

Penunjukan Langsung Cacat Hukum

RTA—Rencana pemerintah menunjuk langsung PT Utama Karya untuk membangun dan mengelola jalan tol trans-Sumatra dinilai cacat hukum dan menimbulkan potensi korupsi di dalamnya.

Novita S. & Mia Chitra D.
redaksi@bisniss.co.id

a, pembangunan proyek em tender itu menyalahi pengadaan barang dan jasa h. Apalagi, nilai investasi juga cukup besar.

atah telah menunjuk Hu- ra untuk membangun dan proyek itu karena dinilai k secara finansial.

r Pengembangan Centre nation Development Stu- (ES) yang juga dosen FISIP Nasional Hilmi R. Ibra- ngatakan sistem penun- gsung itu melanggar Pasal UU No. 38/2004 tentang

UU itu disebutkan pengu- an tol yang diberikan oleh h kepada badan usaha na dimaksud dalam Pasal kukan melalui pelelangan nspirasi dan terbuka.

Selain melanggar aturan UU, kata- nya, langkah itu juga melanggar tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Karena itu, dia mengusulkan agar prosesnya bisa ditender secara terbuka, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

"Apalagi, nantinya akan ada dukungan dana dari APBN. Karena itu, saya pikir ini langkah yang melanggar hukum," ujar Hilmi dalam diskusi publik bertema *Pro Kontra Penunjukan Langsung Huta-*

► Tanpa tender menyalahi aturan pengadaan barang dan jasa.

► Kasus seperti Century Jilid II dikhawatirkan terulang.

► Sudah ditenderkan beberapa kali, tak ada peminat.

ma Karya Sebagai Pembangun dan Pengelola Jalan Tol yang diadakan oleh Institute For Public Trust, Rabu (13/3) di Jakarta.

Hilmi yang juga pengamat kebijakan publik itu mengatakan kewenangan pemerintah untuk ruas-ruas jalan tol yang hanya layak secara ekonomi, namun secara keseluruhan belum layak secara finansial, adalah melakukan pendanaan, perencanaan teknis, dan melaksanakan konstruksi.

Akan tetapi, operasional dan pemeliharaan dilakukan oleh badan usaha yang pemilihannya melalui lelang, bukan penunjukan langsung.

Dengan alasan itu, rencana diterbitkannya peraturan presiden terkait penunjukan Utama Karya untuk pengusahaan jalan tol bertentangan dengan UU No. 38/2004 dan PP No. 15/2005 tentang Jalan Tol.

Penunjukan langsung itu, menurut Hilmi, juga dinilai melanggar prinsip-prinsip efisiensi anggaran negara dan menutup kesempatan BUMN lainnya atau konsorsium badan usaha lainnya yang sudah berpengalaman dalam membangun dan mengelola jalan tol.

Sementara itu, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP-UI) Eman Sulaeman Nasim berpendapat kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa proses tender

Proyek Jalan Tol Utama Karya Trans-Sumatra

Ruas	Panjang (Km)	IRR (%)	Perkiraan Biaya (Rp Miliar)
Lampung-Palembang	358	17	1.200
Palembang-Pekanbaru	610	13	2.000
Pekanbaru-Medan	548	16	1.800
Medan-Banda Aceh	460	9	1.500
Palembang-Bengkulu	303	9	1.000
Pekanbaru-Padang	242	11	800
Medan-Sibolga	172	7	500



Sumber: Kementerian PU

sangat rawan akan penyelewengan.

Dia mengatakan jika langkah ini tetap dilanjutkan, bukan tidak mungkin muncul kasus seperti Century Jilid II. "Ditambah lagi, saat ini mendekati pemilihan umum dan pemilihan presiden, di mana partai politik maupun dan partisipasi pemilu dan pemilihan presiden membutuhkan dana yang amat besar."

TELAH DIKAJI

Menanggapi hal itu, Sekretaris Perusahaan Utama Karya Ari Widiyantoro mengatakan penunjuk-

an secara tangan der usahaan te memayang

"Tentunya berdasarkan ada serta su tah, jadi pe katanya ke

Dia men

mengacu p

50 Pasal 3

keadaan te

kan penge

tol tidak

badan usa

sud pada a

mengambil

kewenang

Dalam k

nya, seper

yek jalan t

ngat proy

secara fina

ekonomi.

ditenderka

gak ada b

nat. Kalau

rate of re

bawah 18%

Oleh ka

nunjuk la

guna men

struktur di

pat medon

"Kalau ma

kapan infr

Selain it

jukan per

persempit

lainnya un

proses ko

derkan. B